

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Keaslian Penelitian	17
D. Tujuan Penelitian	28
E. Manfaat Hasil Penelitian	29
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	30
A. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	30
B. Tindak Pidana Korupsi	38
C. Tindak Pidana Korporasi	53
D. Landasan Teori	86

1. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum	86
2. Sistem Hukum	88
3. Pembaharuan hukum pidana (<i>penal reform</i>).....	89
4. Doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi	93

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	99
B. Jenis dan Cara Pengumpulan Data	101
C. Narasumber	106
D. Analisis Data	106
E. Batasan Konseptual	108
1. Pengertian Reformulasi	108
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	109
3. Pengertian Korporasi	110
4. Pengertian Pertanggungjawaban korporasi.....	111

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Pengaturan Kembali (Reformulasi) tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi	114
1. Implikasi tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus dan berlakunya hukum terhadap perbuatan pidana yang terjadi pasca berlakunya hukum pidana kodifikasi dalam pertanggungjawaban pidana korupsi dalam tindak pidana korupsi.	118

a. Implikasi tindak pidana korporasi sebagai tindak pidana khusus.	118
b. Implikasi atas tindak korupsi sebelum berlakunya hukum pidana kodifikasi	124
2. Penegakan hukum dan pandangan nara sumber terhadap kendala pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi....	115
a. Faktor substansi hukum (<i>legal substance</i>)	172
b. Faktor Struktur hukum (<i>legal struktur</i>)	211
c. Faktor budaya hukum (<i>legal cultur</i>)	227
B. Reformulasi Pengaturan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi di Masa yang Akan Datang.....	237
1. Reformulasi Rumusan Pasal 20 Undang-Undang UU Tipikor	242
2. Reformulasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi	267
3. Tinjauan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	274
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	296
A. Kesimpulan	296
1. Dasar Pertimbangan Pengaturan Kembali (Reformulasi) Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi	296
2. Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi di Masa yang Akan Datang	300



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi
SIGID RIYANTO SH MSI, Prof. Dr. Edward OS Hiariej, S.H. M.Hum ; Prof. Dr Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

B. Saran	307
DAFTAR PUSTAKA	309
INDEKISASI	321
GLOSARIUM	324